**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Penerapaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi birokrasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tahapan-tahapan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yang telah tersusun perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kebijakan Pokok Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, namun tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dimasa-masa mendatang akan semakin berat, mengingat masih cukup kompleksnya permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya tentang masih tingginya kemiskinan di perdesaan. Namun kekurangberdayaan masyarakat di desa/kelurahan yang antara lain diindikasikan oleh kemiskinan tersebut ternyata sangat komplek dan saling terkait yakni: (a) kualitas sumberdaya manusia masih rendah, baik dalam motivasi maupun dalam penguasaan manajemen dan teknologi; (b) kelembagaan yang belum mampu memberikan fasilitas dengan baik kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara optimal; (c) prasarana dan sarana yang belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama infrastruktur perhubungan maupun pendidikan, kesehatan dan untuk pengembangan ekonomi mikro masyarakat perdesaan; (d) minimnya modal usaha yang dimiliki masyarakat; dan (e) berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada sehingga tidak kondusif bagi pengembangan kemandirian masyarakat. Kelemahan ini baik yang bersifat internal maupun eksternal mengakibatkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan, diserap dan dimanfaatkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang kaya dan mampu.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah telah menggunakan berbagai pendekatan baik secara umum maupun secara khusus yang bersifat multi aspek dan multi sektor yang dalam pelaksanaanya melibatkan berbagai instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya pada tingkat masyarakat desa dikoordinasikan dalam wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain, sesuai dengan peranan dan kemampuan masing-masing desa.

Memperhatikan potensi dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada agenda prioritas pemerintah terkait dengan desa melihat pada Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada point ke 3 (tiga) berbunyi **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”**.

Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pembangunan daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa telah melaksanakan berbagai agenda yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
3. PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
5. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan antara lain:

1. tersusunnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan desa, meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana terakhir kali telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
2. di tahun 2014 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (b) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (c) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan (d) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. di tahun 2015 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, (b) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (c) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan (d) Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
4. di tahun 2016 ditetapkan 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (b) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (c) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (d) Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan (e) Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Kementerian Dalam Negeri memiliki tujuan pengaturan desa yang antara lain adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
7. meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Fokus Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah:

1. Pengawalan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan;
2. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal;
3. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;
4. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar;
5. Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.
6. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan.

Sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maka visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah **“*Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Kalimantan Tengah yang Partisipasif”***

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.

c. Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.

d. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Mikro.

e. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi SDA melalui Pengembangan TTG.

Sebagai penjabaran visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu **”KALTENG Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat** menuju **KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius Kuat, Amanah dan Harmonis)**”

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

a. Jalan, Jembatan;

b. Jalan Kereta Api;

c. Pelabuhan Udara;

d. Pelabuhan Laut, ASDP (Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan);

e. Kelistrikan.

3. Pengelolaan Sumber Daya Air Pesisir dan Pantai

4. Pengendalian inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan:

a. Pengendalian Inflasi;

b. Pertumbuhan Ekonomi;

c. Penanggulangan Kemiskinan.

5. Peningkatan aktivitas Perekonomian Masyarakat menuju KALTENG BERKAH, perlu langkah-langkah strategi sebagai berikut:

a. Membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berkarya di instansi Pemerintah maupun Swasta;

b. Mengupayakan agar setiap Rumah Tangga memiliki sumber usaha yang menghasilkan pendapatan tetap secara terus menerus guna membiayai kebutuhan hidup secara layak;

c. MerasionaIkan harga kebutuhan bahan pokok (pangan, sandang dan Perumahan):

d. Gerakan fasititator desa yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif pada lokal-lokal atau komunitas- komunitas tertentu;

e. Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan;

f. Mendukung dan mempercepat ijin usaha ekonomi menengah kebawah.

6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang profesional, adil dan anti korupsi:

a. Mempersiapkan SDM Aparatur Pelaksana Pemerintahan yang profesional & anti korupsi;

b. Penempatan Personalia Aparatur Pemerintahan berdasarkan kapasitas dan kompetensinya;

c. Mendukung pemekaran wilayah sesuai ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya:

Pendidikan:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan;
2. Mengotimalkan manajemen pendidikan dengan akhir kelulusan yang memiliki daya saing tinggi;
3. Peningkatan Kualitas Dosen/Guru pada semua jenjang di bidang pendidikan;
4. Pengiriman Mahasiswa berprestasi sekolah keluar negeri;
5. Revitalisasi kegiatan olah raga, seni budaya dan pembinaan generasi muda.

Kesehatan:

1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualifikasi rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat & pemberantasan narkoba;
3. Peningkatan kualifikasi Dokter dan Paramedis.

Sosial Budaya:

1. Harmonisasi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan;
2. Memantapkan keberadaan masyarakat adat dayak dan kearifan lokal dalam filosofi budaya betang;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta tujuan wisata di KaIteng;
4. Pengembangan objek-objek pariwisata baik objek wisata budaya maupun wisata alam di Kalteng;
5. Membuka pendidikan kepariwisataan untuk penyediaan tenaga pelayanan pariwisata di Kalteng.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA):
7. Pelaksanaan legislasi kepemilikan lahan melalui sertifikasi lahan bagi kelompok tani [Dayak Misik](http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1622);
8. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis;
9. Pengelolaan SDA secara berhati-hati serta berkelanjutan;
10. Reboisasi dan Rehabilitasi lahan dan hutan;
11. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
12. Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta Ha.
13. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
14. Mendorong dan mengupayakan kerja-sama dengan Pihak Perguruan Tinggi dan Swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah;
15. Mengupayakan peningkatan volume APBD setiap tahunnya;
16. Peningkatan kompetensi SDM pengelola.

Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin diperdesaan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada Program Nasional dan Program Daerah, pada tahun anggaran 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Program yang bersumber dana dari APBN yaitu :

* Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

* Program Bina Pemerintahan Desa

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kader Desa

Program yang bersumber dana dari APBD yaitu :

* Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

* Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan RKA-SKPD
6. Penyusunan LAKIP
7. Penyusunan Renja SKPD
8. Penyusunan Laporan TEPPA/SIMPPD

* Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

1. Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

* Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Lomba Pokjanal Posyandu
3. Pelaksanaan Profil Desa/ Kelurahan
4. PAP PNPM Mandiri Perdesaan Generasi
5. Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

* Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan
2. Penguatan Lembaga Pasar Desa Untuk Pemasaran Hasil Produksi UEM
3. Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Pemanfaatan SDA Pedesaan Bagi Pembangunan Ketahanan Masyarakat (CPPD)
5. Pembinaan BUMDes
6. Pelaksanaan Pameran

* Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Pembinaan Pembangunan Desa
2. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan
3. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

* Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota
3. Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa
4. Sosialisasi Peraturan Desa
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

* Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1. Pola Kemitraan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) dengan Masyarakat
2. Pelaksanaan Gelar TTG
3. Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Posyantek
4. Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
5. Peningkatan dan Pemanfaatan SDA di Kawasan Pesisir

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta menyelaraskan antara rancangan program dengan kegiatan diperlukan suatu acuan Rencana Kerja (RENJA). Untuk mendorong agar pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan yang baik (Good Service) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya efektif Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya berfungsi sebagai dokumen rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017.

1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum rencana kerja sebagai berikut :

* + - 1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah ”Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat”;
      2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
      3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
      4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
      5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
      7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
      8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
      9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
      10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
      12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
      13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
      14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
      15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
3. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
4. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
5. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.
6. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Merumuskan arah Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Merupakan rujukan arah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 (satu) tahun kedepan;
3. Merupakan rujukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 (satu) tahun kedepan.
4. **Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai LatarBelakang**,** Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja, Sistematika Penulisan.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016

Berisikan uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan uraian tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan tentang Program dan Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017.

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penjelasan tentang Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 yang dipakai sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra**

Pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Tahun 2016 dari dana DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana sebesar Rp. 16.287.986.981,- yang telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 15.916.395.682,- atau 97,72 % sedangkan realisasi fisiknya sebesar 98,89 %. Realisasi anggaran yang belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : 1) terdapatnya sisa dana untuk pembayaran gaji pegawai yang cukup besar nilainya, 2) terdapat sisa perjalanan dinas, 3) terdapat sisa dana yang tidak bisa digunakan lagi dan 4) terdapat kegiataan yang belum sempat dilaksanakan.

Adapun evaluasi pelaksanaanRenja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tabel 2.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Kode** | | | | |  | **Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)** | **Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021** | | **Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2015)** | | **Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalannya Dievaluasi (2016)** | | **Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2016)** | | **Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2016 (%)** | | **Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017** | | **Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016 (%)** | |
|
| 1 | 2 | | | | |  | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
|  | **1** | | | | | **Urusan Wajib** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **22** | **01** |  |  | **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **22** | **01** | **01** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  | **14.770.042.000,-** |  | **1.979.424.190,-** |  | **2.954.008.400,-** |  | **2.851.820.491,-** |  |  |  | **4.831.244.681,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Surat yg dikeluarkan | 7.000 | 63.575.000,- | 1.400 | 12.560.000,- | 1.400 | 12.715.000,- | 1.400 | 12.283.000,- | 100 | 96,60 | 2.800 | 24.843.000,- | 40,00 | 39,08 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran biaya rek. telp, listrik dan air | 25 | 1.184.000.000,- | 5 | 156.153.407,- | 5 | 236.800.000,- | 5 | 197.229.960,- | 100 | 83,29 | 10 | 353.383.367,- | 40,00 | 29,85 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 05 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Asuransi gedung kantor | 5 | 100.000.000,- | 1 | 17.426.345,- | 1 | 20.000.000,- | 1 | 17.522.260,- | 100 | 87,61 | 2 | 34.948.605,- | 40,00 | 34,95 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Pajak & perpanjangan stnk | 95 | 50.000.000,- | 19 | 3.860.600,- | 19 | 10.000.000,- | 16 | 5.377.700,- | 84,21 | 53,78 | 35 | 9.238.300,- | 36,84 | 18,48 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset | Pengelola keu & tenaga kontrak | 245 | 4.982.235.000,- | 35 | 622.746.350,- | 49 | 996.447.000,- | 49 | 992.773.000,- | 100 | 99,63 | 84 | 1.615.519.350,- | 34,29 | 32,43 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Cleaning service dan alat kebersihan | 100 | 303.975.000,- | 21 | 12.784.000,- | 20 | 60.795.000,- | 20 | 60.791.200,- | 100 | 99,99 | 41 | 73.575.200,- | 41,00 | 24,20 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yg diservice | 60 | 75.000.000,- | 12 | 15.000.000,- | 12 | 15.000.000,- | 12 | 15.000.000,- | 100 | 100,00 | 24 | 30.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | 105 | 107.500.000,- | 21 | 21.500.000,- | 21 | 21.500.000,- | 21 | 21.500.000,- | 100 | 100,00 | 42 | 43.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak dan penggandaan dokumen/ surat | 228.250 | 157.500.000,- | 45.650 | 31.495.600,- | 45.650 | 31.500.000,- | 45.650 | 31.500.000,- | 100 | 100,00 | 91.300 | 62.995.600,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik | 55 | 350.000.000,- | 11 | 67.743.000,- | 11 | 70.000.000,- | 11 | 60.536.500,- | 100 | 86,48 | 22 | 128.279.500,- | 40,00 | 36,65 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | 30 | 225.000.000,- | 2 | 28.500.000,- | 6 | 45.000.000,- | 6 | 45.000.000,- | 100 | 100,00 | 8 | 73.500.000,- | 26,67 | 32,67 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga kantor | 50 | 50.000.000,- | 10 | 10.000.000,- | 10 | 10.000.000,- | 10 | 10.000.000,- | 100 | 100,00 | 20 | 20.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah media/ surat kabar/ majalah | 20 | 4.665.490.000,- | 4 | 730.658.900,- | 4 | 933.098.000,- | 4 | 894.975.000,- | 100 | 95,91 | 8 | 1.625.633.900,- | 40,00 | 34,84 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Snack dan makan minum rapat | 20 | 50.000.000,- | 4 | 10.000.000,- | 4 | 10.000.000,- | 4 | 10.000.000,- | 100 | 100,00 | 8 | 20.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas ke luar daerah | 75 | 1.032.245.000,- | 15 | 112.350.000,- | 15 | 206.449.000,- | 15 | 202.668.711,- | 100 | 98,17 | 30 | 315.018.711,- | 40,00 | 30,52 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Perjalanan dinas ke dalam daerah | 125 | 1.288.522.000,- | 19 | 114.645.988,- | 25 | 257.704.400,- | 25 | 257.664.660,- | 100 | 99,98 | 44 | 372.310.648,- | 35,20 | 28,89 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 20 | Rujukan berobat PNS | Bantuan berobat pegawai BPMPD | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 21 | Penyusunan RKA SKPD BPMPD Prov. Kalteng | Dokumen RKA/DPA dan RKPA/DPPA | 1.000 | 85.000.000,- | 200 | 12.000.000,- | 200 | 17.000.000,- | 200 | 16.998.500,- | 100 | 99,99 | 400 | 28.998.500,- | 40,00 | 34,12 |
|  | 1 | 22 | 01 | 01 | 54 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah peralatan dan mesin | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** | **22** | **01** | **02** |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  | **1.310.000.000,-** |  | **1.328.452.800,-** |  | **472.000.000,-** |  | **459.733.000,-** |  |  |  | **1.788.185.800,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional | 20 | 700.000.000,- | 0 | 0,- | 1 | 350.000.000,- | 1 | 337.740.600,- | 100 | 96,50 | 1 | 337.740.600,- | 5,00 | 48,25 |
|  | 1 | 22 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah bahan baku bangunan | 50 | 185.000.000,- | 10 | 15.000.000,- | 10 | 37.000.000,- | 10 | 37.000.000,- | 100 | 100,00 | 20 | 52.000.000,- | 40,00 | 28,11 |
|  | 1 | 22 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional | 95 | 325.000.000,- | 19 | 68.000.000,- | 19 | 65.000.000,- | 19 | 64.992.400,- | 100 | 99,99 | 38 | 132.992.400,- | 40,00 | 40,92 |
|  | 1 | 22 | 01 | 02 | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 100 | 100.000.000,- | 20 | 20.000.000,- | 20 | 20.000.000,- | 20 | 20.000.000,- | 100 | 100,00 | 40 | 40.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Persentase capaian rehap gedung kantor | 0 | 0,- | 10 | 1.225.452.800,- |  |  |  |  |  |  | 10 | 1.225.452.800,- |  |  |
| **3** | **1** | **22** | **01** | **03** |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  | **0,-** |  | **39.000.000,-** |  | **0,-** |  | **0,-** |  |  |  | **39.000.000,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 03 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas kantor | 0 | 0,- | 60 | 39.000.000,- |  |  |  |  |  |  | 60 | 39.000.000,- |  |  |
| **4** | **1** | **22** | **01** | **05** |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  | **0,-** |  | **8.480.000,-** |  | **0,-** |  | **0,-** |  |  |  | **8.480.000,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 05 | 03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Perjalanan dinas | 0 | 0,- | 10 | 8.480.000,- |  |  |  |  |  |  | 10 | 8.480.000,- |  |  |
| **5** | **1** | **22** | **01** | **06** |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  | **240.000.000,-** |  | **47.999.200,-** |  | **48.000.000,-** |  | **47.995.200,-** |  |  |  | **95.994.400,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen | 200 | 30.000.000,- | 40 | 6.000.000,- | 40 | 6.000.000,- | 40 | 6.000.000,- | 100 | 100,00 | 80 | 12.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen | 400 | 30.000.000,- | 80 | 6.000.000,- | 80 | 6.000.000,- | 80 | 6.000.000,- | 100 | 100,00 | 160 | 12.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen | 200 | 15.000.000,- | 40 | 3.000.000,- | 40 | 3.000.000,- | 40 | 3.000.000,- | 100 | 100,00 | 80 | 6.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen | 200 | 15.000.000,- | 40 | 3.000.000,- | 40 | 3.000.000,- | 40 | 3.000.000,- | 100 | 100,00 | 80 | 6.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 14 | Penyusunan LAKIP | Jumlah dokumen | 50 | 12.500.000,- | 10 | 2.500.000,- | 10 | 2.500.000,- | 10 | 2.500.000,- | 100 | 100,00 | 20 | 5.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 15 | Penyusunan renja SKPD | Jumlah dokumen | 50 | 12.500.000,- | 10 | 2.500.000,- | 10 | 2.500.000,- | 10 | 2.500.000,- | 100 | 100,00 | 20 | 5.000.000,- | 40,00 | 40,00 |
|  | 1 | 22 | 01 | 06 | 33 | Penyusunan laporan TEPRA/ SIMPPD | Honor operator dan jumlah dokumen | 65 | 125.000.000,- | 13 | 24.999.200,- | 13 | 25.000.000,- | 13 | 24.995.200,- | 100 | 99,98 | 26 | 49.994.400,- | 40,00 | 40,00 |
| **6** | **1** | **22** | **01** | **08** |  | **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah** |  |  | **977.240.000,-** |  | **122.136.500,-** |  | **195.448.000,-** |  | **195.448.000,-** |  |  |  | **317.584.500,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 08 | 01 | Pengelolaan inventaris barang daerah | Honor pengelola barang daerah dan jumlah dokumen | 125 | 977.240.000,- | 20 | 122.136.500,- | 25 | 195.448.000,- | 25 | 195.448.000,- | 100 | 100,00 | 45 | 317.584.500,- | 36,00 | 32,50 |
| **7** | **1** | **22** | **01** | **15** |  | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  |  | **21.077.688.000,-** |  | **2.153.036.420,-** |  | **4.215.537.600,-** |  | **4.116.746.751,-** |  |  |  | **6.269.783.171,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 05 | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | Jumlah laporan | 50 | 9.497.500.000,- | 10 | 1.549.576.610,- | 10 | 1.899.500.000,- | 10 | 1.897.563.500,- | 100 | 99,90 | 20 | 3.447.140.110,- | 40,00 | 36,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 07 | Lomba pokjanal posyandu | Jumlah kab/ kota yang mendapat penilaian lomba | 70 | 500.000.000,- | 14 | 97.942.500,- | 14 | 100.000.000,- | 14 | 97.977.500,- | 100 | 97,98 | 28 | 195.920.000,- | 40,00 | 39,18 |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 08 | Pelaksanaan PMT-AS | Jumlah Kab/ kota yg melaksanakan PMT-AS | 30 | 315.000.000,- | 3 | 62.577.000,- | 6 | 63.000.000,- | 6 | 62.919.000,- | 100 | 99,87 | 9 | 125.496.000,- | 30,00 | 39,84 |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 09 | Pelaksanaan profil desa/ kelurahan | Jumlah desa/ kel yg melaksanakan profil desa | 0 | 0,- | 1.558 | 99.755.000,- |  |  |  |  |  |  | 1.558 | 99.755.000,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 10 | Pelaksanaan penilaian P2W-KSS | Jumlah kab/ kota yg mengikuti penilaian P2W-KSS | 40 | 750.000.000,- | 5 | 132.974.000,- | 8 | 150.000.000,- | 7 | 87.212.200,- | 87,50 | 58,14 | 12 | 220.186.200,- | 30,00 | 29,36 |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 11 | Sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak | Jumlah peserta sosialisasi | 0 | 0,- | 40 | 55.400.000,- |  |  |  |  |  |  | 40 | 55.400.000,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 13 | Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi | 0 | 0,- | 50 | 88.607.800,- |  |  |  |  |  |  | 50 | 88.607.800,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 19 | PAP PNPM -MPd Generasi masyarakat perdesaan | Jumlah dokumen laporan | 5 | 331.025.000,- | 1 | 66.203.510,- | 1 | 66.205.000,- | 1 | 64.463.750,- | 100 | 97,37 | 2 | 130.667.260,- | 40,00 | 39,47 |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 20 | Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah kab/kota yg terfasilitasi dlm peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | 70 | 9.684.163.000,- | 0 | 0,- | 14 | 1.936.832.600,- | 14 | 1.906.610.801,- | 100 | 98,44 | 14 | 1.906.610.801,- | 20,00 | 19,69 |
|  | 1 | 22 | 01 | 15 | 21 | Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN) | Jumlah dokumen laporan | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **1** | **22** | **01** | **16** |  | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  |  | **4.304.935.000,-** |  | **591.599.900,-** |  | **860.987.000,-** |  | **733.974.800,-** |  |  |  | **1.325.574.700,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 08 | Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro didaerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah | Jumlah peserta pelatihan | 150 | 350.000.000,- | 30 | 67.412.800,- | 30 | 70.000.000,- | 30 | 67.302.800,- | 100 | 96,15 | 60 | 134.715.600,- | 40,00 | 38,49 |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 09 | Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM | Laporan penilaian lomba pasar desa | 5 | 627.500.000,- | 1 | 85.000.000,- | 1 | 125.500.000,- | 1 | 12.550.000,- | 100 | 10,00 | 2 | 97.550.000,- | 40,00 | 15,55 |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 10 | Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan | Jumlah laporan | 5 | 513.575.000,- | 1 | 74.815.300,- | 1 | 102.715.000,- | 1 | 102.715.000,- | 100 | 100,00 | 2 | 177.530.300,- | 40,00 | 34,57 |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 11 | Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD) | Jumlah peserta | 150 | 350.000.000,- | 30 | 68.598.600,- | 30 | 70.000.000,- | 30 | 70.000.000,- | 100 | 100,00 | 60 | 138.598.600,- | 40,00 | 39,60 |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 15 | Bantuan paket modal BUMDes lengkap dengan buku administrasi | Jumlah kab/kota yg mendapat bantuan paket modal | 10 | 722.500.000,- | 2 | 49.773.200,- | 2 | 144.500.000,- | 2 | 133.135.000,- | 100 | 92,13 | 4 | 182.908.200,- | 40,00 | 25,32 |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 17 | Pelaksanaan pameran | Jumlah dokumen laporan | 10 | 1.741.360.000,- | 2 | 246.000.000,- | 2 | 348.272.000,- | 2 | 348.272.000,- | 100 | 100,00 | 4 | 594.272.000,- | 40,00 | 34,13 |
|  | 1 | 22 | 01 | 16 | 22 | Pembangunan pasar desa | Jumlah kab yg terfasilitasi dalam pembangunan pasar desa | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,- |  |  |
| **9** | **1** | **22** | **01** | **17** |  | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  |  | **6.124.400.000,-** |  | **1.336.045.401,-** |  | **1.224.880.000,-** |  | **1.206.235.204,-** |  |  |  | **2.542.280.605,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 17 | 05 | Pelaksanaan PM2L | Jumlah dokumen laporan | 5 | 446.000.000,- | 5 | 500.083.120,- | 1 | 89.200.000,- | 1 | 75.751.476,- | 100 | 84,92 | 6 | 575.834.596,- | 120,00 | 129,11 |
|  | 1 | 22 | 01 | 17 | 06 | Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan | Jumlah dokumen laporan | 5 | 1.000.000.000,- | 1 | 179.878.700,- | 1 | 200.000.000,- | 1 | 199.800.000,- | 100 | 99,90 | 2 | 379.678.700,- | 40,00 | 37,97 |
|  | 1 | 22 | 01 | 17 | 08 | Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat | Jumlah dokumen laporan | 10 | 1.250.000.000,- | 1 | 196.060.000,- | 2 | 250.000.000,- | 2 | 246.682.750,- | 100 | 98,67 | 3 | 442.742.750,- | 30,00 | 35,42 |
|  | 1 | 22 | 01 | 17 | 10 | Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa | Jumlah aparatur yg menjadi peserta rakernis | 0 | 0,- | 56 | 129.450.000,- |  |  |  |  |  |  | 56 | 129.450.000,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 17 | 11 | Sosialisasi Penanganan HIV-AIDS | Jumlah peserta sosialisasi | 200 | 750.000.000,- | 0 | 0,- | 40 | 150.000.000,- | 40 | 149.440.000,- | 100 | 99,63 | 40 | 149.440.000,- | 20,00 | 19,93 |
|  | 1 | 22 | 01 | 17 | 12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah | 175 | 2.678.400.000,- | 30 | 330.573.581,- | 35 | 535.680.000,- | 35 | 534.560.978,- | 100 | 99,79 | 65 | 865.134.559,- | 37,14 | 32,30 |
| **10** | **1** | **22** | **01** | **18** |  | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  |  | **4.275.435.000,-** |  | **822.162.220,-** |  | **855.087.000,-** |  | **840.888.679,-** |  |  |  | **1.663.050.899,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 05 | Pelatihan bimtek, rakor pengelolaan ADD, keuangan dan aset kekayaan desa sebagai sumber PADes | Jumlah aparatur desa yg mampu mengelola keuangan dan aset desa | 150 | 388.250.000,- | 26 | 75.849.420,- | 30 | 77.650.000,- | 30 | 71.491.380,- | 100 | 92,07 | 56 | 147.340.800,- | 37,33 | 37,95 |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 06 | Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota | Perjalanan dinas dalam daerah | 100 | 837.500.000,- | 18 | 67.855.250,- | 20 | 167.500.000,- | 20 | 167.079.810,- | 100 | 99,75 | 38 | 234.935.060,- | 38,00 | 28,05 |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 07 | Pelaksanaan bantuan keuangan pemdes dan kel | Jumlah tim verifikasi dan monitoring | 35 | 299.500.000,- | 7 | 60.000.000,- | 7 | 59.900.000,- | 7 | 59.870.000,- | 100 | 99,95 | 14 | 119.870.000,- | 40,00 | 40,02 |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 08 | Pelaksanaan pembinaan pemdes dan kel pada desa model | Jumlah desa model yg dibina | 35 | 300.000.000,- | 1 | 39.840.000,- | 7 | 60.000.000,- | 7 | 59.588.910,- | 100 | 99,31 | 8 | 99.428.910,- | 22,86 | 33,14 |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 09 | Pelatihan pemantapan tupoksi BPD | Jumlah peserta pelatihan | 0 | 0,- | 30 | 79.750.000,- |  |  |  |  |  |  | 30 | 79.750.000,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 11 | Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa | Jumlah aparatur desa yg mengikuti pelatihan | 0 | 0,- | 30 | 72.720.000,- |  |  |  |  |  |  | 30 | 72.720.000,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 15 | Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa | Jumlah aparatur yg mengikuti sosialisasi | 600 | 492.125.500,- | 120 | 82.613.500,- | 120 | 98.425.100,- | 120 | 97.975.000,- | 100 | 99,54 | 240 | 180.588.500,- | 40,00 | 36,70 |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 16 | Kaji banding pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa | Jumlah yg mengikuti kaji banding ke luar daerah | 0 | 0,- | 20 | 343.534.050,- |  |  |  |  |  |  | 20 | 343.534.050,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 17 | Bimtek pemantapan pemerintahan kelurahan | Jumlah peserta bimtek | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 18 | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Jumlah desa/kel yg mendapat pembinaan | 600 | 1.958.059.500,- | 0 | 0,- | 120 | 391.611.900,- | 120 | 384.883.579,- | 100 | 98,28 | 120 | 384.883.579,- | 20,00 | 19,66 |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 19 | Bimtek pengadaan barang/jasa di desa | Jumlah peserta bimtek | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,- |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 18 | 20 | Inventarisasi aset desa | Jumlah dokumen laporan | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,- |  |  |
| **11** | **1** | **22** | **01** | **19** |  | **Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan** |  |  | **0,-** |  | **0,-** |  | **0,-** |  | **0,-** |  |  |  | **0,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 19 | 05 | Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa | Jumlah aparatur di lembaga pemerintahan desa yg mengikuti pelatihan | 0 | 0,- | 40 | 0,- |  |  |  |  |  |  | 40 | 0,- |  |  |
| **12** | **1** | **22** | **01** | **20** |  | **Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  |  | **3.362.500.000,-** |  | **587.706.090,-** |  | **672.500.000,-** |  | **669.606.544,-** |  |  |  | **1.257.312.634,-** |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 20 | 01 | Kemitraan TMMD dengan masyarakat | Jumlah kab/kota yg mendapatkan bantuan stimulan tmmd | 5 | 300.000.000,- | 1 | 59.699.400,- | 1 | 60.000.000,- | 1 | 59.653.860,- | 100 | 99,42 | 2 | 119.353.260,- | 40,00 | 39,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 22 | 01 | 20 | 02 | Pelaksanaan gelar TTG | Jumlah kab/kota yg mengikuti Gelar TTG Tk. Nasional | 70 | 1.500.000.000,- | 14 | 310.000.000,- | 14 | 300.000.000,- | 14 | 298.858.374,- | 100 | 99,62 | 28 | 608.858.374,- | 40,00 | 40,59 |
|  | 1 | 22 | 01 | 20 | 06 | Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek | Jumlah dokumen laporan | 25 | 445.000.000,- | 4 | 75.000.000,- | 5 | 89.000.000,- | 5 | 88.168.150,- | 100 | 99,07 | 9 | 163.168.150,- | 36,00 | 36,67 |
|  | 1 | 22 | 01 | 20 | 08 | Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa | Jumlah monev pelaksanaan CSR dan CD | 125 | 467.500.000,- | 20 | 69.779.750,- | 25 | 93.500.000,- | 25 | 93.238.030,- | 100 | 99,72 | 45 | 163.017.780,- | 36,00 | 34,87 |
|  | 1 | 22 | 01 | 20 | 09 | Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir | Jumlah peserta rakor | 70 | 650.000.000,- | 14 | 73.226.940,- | 14 | 130.000.000,- | 14 | 129.688.130,- | 100 | 99,76 | 28 | 202.915.070,- | 40,00 | 31,22 |
|  | 1 | 22 | 01 | 20 | 21 | Pengembangan hasil inovasi TTG | Jumlah kab/ kota yg mendapatkan bantuan alat inovasi TTG | 0 | 0,- | 0 | 0,- |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,- |  |  |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan**

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutinitas dimana program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun seperti itu baik program dan kegiatan yang bersifat nasional maupun yang bersifat daerah (lokal), walaupun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang baru namun sifatnya lambat perkembangannya dengan menyesuaikan keadaan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah maupun kepentingan yang lain.

Program dan kegiataan yang bersifat rutinitas ini disebabkan antara lain : 1) sesuai dengan kebijakan dari eselon I atau Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 2) alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah relatif kecil, sehingga untuk membuat program-program baru yang menyentuh langsung ke masyarakat tidak dapat terpenuhi; 3) Program dan kegiatan hanya bersifat pembinaan bukan pelaksana teknis secara langsung.

Sedangkan pengkajian pada hasil evaluasi pelaksananan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 realisasi per kegiatan rata-rata hampir mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tabel 2.2** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN** | | | | | **REALISASI CAPAIAN** | | | | | **CATATAN ANALISIS** |
| **SASARAN** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1. | Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. | 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa. | a.      Jumlah aparatur desa/kelurahan yang terampil dalam tata kelola keuangan dan aset desa/ kelurahan. | 280 Org | 300 Org | 320 Org | 340 Org | 360 Org | 280 Org |  |  |  |  |  |
| b.     Jumlah aparatur desa yang mengikuti sosialisasi dalam pemahaman undang-undang dan peraturan lainnya tentang desa. | 120 Org | 120 Org | 120 Org | 120 Org | 120 Org | 120 Org |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c.     Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai aturan perundangan. | 65 Desa | 65 Desa | 65 Desa | 65 Desa | 65 Desa | 65 Desa |  |  |  |  |  |
| 2. | Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa. | 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa. | a.     Jumlah PKK aktif. | 1.716 Unit | 1.716 Unit | 1.718 Unit | 1.720 Unit | 1.722 Unit | 1.716 Unit |  |  |  |  |  |
| b.     Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Profil Desa/ Kelurahan melalui Pendataan di Kabupaten/ Kota. | 1420 Desa/ 138 Kel. | 1420 Desa/ 138 Kel. | 1420 Desa/ 138 Kel. | 1420 Desa/ 138 Kel. | 1420 Desa/ 138 Kel. | 1420 Desa/ 138 Kel. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c.     Jumlah kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa. | 13 Kab | 13 Kab | 13 Kab | 13 Kab | 13 Kab | 13 Kab |  |  |  |  |  |
| 3. | Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis. | 3. Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa. | a.     Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. | 50 Org | 40 Org | 40 Org | 40 Org | 40 Org | 50 Org |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| b.     Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat. | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok |  |  |  |  |  |
| 4. | Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan. | 4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa. | a.     Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas LKM didaerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah. | 30 Org | 30 Org | 30 Org | 30 Org | 30 Org | 30 Org |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| b.     Jumlah Kabupaten yang mendapat bantuan paket modal/ stimulan dan buku administrasi BUMDes. | 2 Kab | 2 Kab | 2 Kab | 2 Kab | 2 Kab | 2 Kab |  |  |  |  |  |
| 5. | Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan. | 5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa. | a.     Jumlah alat TTG yg diperlombakan/ dipamerkan di tk nasional. | 14 alat | 14 alat | 14 alat | 14 alat | 14 alat | 14 alat |  |  |  |  |  |
|
|
| b.     Jumlah posyantek & wartekdes yg terbentuk. | 116 unit | 220 unit | 381 unit | 385 unit | 481 unit | 116 unit |  |  |  |  |  |
| c.     Jumlah perserta yang mengikuti rakor pengembangan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir. | 28 Org | 28 Org | 28 Org | 42 Org | 42 Org | 28 Org |  |  |  |  |  |

* 1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka telah dilaksanakan program-program dan kegiatan yang berkaitan dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terutama yang berkaitan dengan menanggulangi kemiskinan daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, agar terjadi sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa program daerah seperti Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Program-program/Kegiatan yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten sebagai program andalan daerah dalam menanggulangi kemiskinan, maupun Program-Program dan kegiatan yang telah ditentukan dan berasal dari pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpotensi dalam menangani penanggulangan kemiskinan seperti Program-Program dan Kegiatan yang tidak secara langsung menyentuh masyarakat seperti Lomba Desa/Kelurahan, Pengembangan Pokjanal Posyandu, Pelaksanaan Profil Desa/Kelurahan, Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan lain-lain. Sedang Program dan Kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat langsung yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Namun dalam menjalankan program dan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kurang maksimal karena kurang didukung oleh alokasi dana yang memadai dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi lima tahunan.

* 1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada Tahun Anggaran 2016 telah diusulkan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kebutuhannya, namun dalam perkembangannya terdapat perbedaan antara program dan kegiatan serta pagu yang diusulkan dengan hasil akhirnya yang diperoleh sesuai dengan DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016. Perbedaan tersebut terlihat pada kegiatan dan pagu anggaran yang terdapat perubahan dimana kegiatan yang sebelumnya diusulkan pada RKPD tidak termuat lagi pada DPA, demikian sebaliknya kegiatan yang sebelumnya tidak diusulkan pada RKPD termuat pada DPA, hal ini salah satunya adanya penyesuaikan dengan pagu anggaran definif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah serta perubahan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan daerah. Perkembangan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.3** | | | | | | | | | | |
| **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017** | | | | | | | | | | |
| **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | |
| **Prog / Keg** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.000)** | **Prog / Keg** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan dana (Rp.000)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun** |  | **2.165.858.400** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun** |  | **2.165.858.400** |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya penyediaan materai, penggandaan surat menyurat | 1 Paket | 12.715.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya penyediaan materai, penggandaan surat menyurat | 1 Paket | 12.715.000 |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Palangka Raya | Pembayaran biaya rekening telepon, listrik dan air | 12 Bulan | 236.800.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Palangka Raya | Pembayaran biaya rekening telepon, listrik dan air | 12 Bulan | 236.800.000 |
|  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya asuransi kebakaran gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng | 1 Tahun | 20.000.000 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya asuransi kebakaran gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng | 1 Tahun | 20.000.000 |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 | 1 Tahun | 10.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 | 1 Tahun | 10.000.000 |
|  | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium pengelola keuangan | 12 Bulan | 975.747.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium pengelola keuangan | 12 Bulan | 975.747.000 |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium petugas kebersihan, jaga malam dan pemeliharaan taman serta pengadaan alat pembersih dan alat kebersihan | 12 Bulan | 136.395.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium petugas kebersihan, jaga malam dan pemeliharaan taman serta pengadaan alat pembersih dan alat kebersihan | 12 Bulan | 136.395.000 |
|  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya jasa pemeliharaan/ service komputer, mesin tik | 12 Unit | 15.000.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya jasa pemeliharaan/ service komputer, mesin tik | 12 Unit | 15.000.000 |
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | 21.500.000 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | 21.500.000 |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Palangka Raya | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen/ surat | 12 Bulan | 31.500.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Palangka Raya | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen/ surat | 12 Bulan | 31.500.000 |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pembelian bola lampu dan peralatan listrik lainnya dan pemasangan baru instalasi/ pemasangan listrik untuk gedung/aula BPMPD Prov. Kalteng | 4 Paket | 15.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pembelian bola lampu dan peralatan listrik lainnya dan pemasangan baru instalasi/ pemasangan listrik untuk gedung/aula BPMPD Prov. Kalteng | 4 Paket | 15.000.000 |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya sarana dan fasilitas administrasi perkantoran | 1 Paket | 230.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya sarana dan fasilitas administrasi perkantoran | 1 Paket | 230.000.000 |
|  | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kota Palangka Raya | Tersedianya peralatan rumah tangga kantor | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kota Palangka Raya | Tersedianya peralatan rumah tangga kantor | 12 Bulan | 10.000.000 |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Palangka Raya | Tersedianya pembayaran langganan surat kabar/majalah, buletin media informasi pemberdayaan masyarakat dan desa | 12 Bulan | 70.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Palangka Raya | Tersedianya pembayaran langganan surat kabar/majalah, buletin media informasi pemberdayaan masyarakat dan desa | 12 Bulan | 70.000.000 |
|  | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Palangka Raya | Tersedianya sarana dan fasilitas administrasi perkantoran | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Palangka Raya | Tersedianya sarana dan fasilitas administrasi perkantoran | 12 Bulan | 10.000.000 |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya snack dan minuman tamu/ rapat | 12 Bulan | 145.449.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya snack dan minuman tamu/ rapat | 12 Bulan | 145.449.000 |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah | 1 Tahun | 225.152.400 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah | 1 Tahun | 305.152.400 |
| **2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur** |  | **360.000.000** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur** |  | **360.000.000** |
|  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 | 1 unit | 250.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 | 1 unit | 250.000.000 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya service AC, sound sistem dan peralatan gedung kantor lainnya | 12 Bulan | 30.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya service AC, sound sistem dan peralatan gedung kantor lainnya | 12 Bulan | 30.000.000 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pengganti suku cadang kendaraan roda 4, pembelian pelumas dan bensin kendaraan roda 4 | 1 Paket | 60.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pengganti suku cadang kendaraan roda 4, pembelian pelumas dan bensin kendaraan roda 4 | 1 Paket | 60.000.000 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor | 1 paket | 20.000.000 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor | 1 Paket | 20.000.000 |
| **3** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | **Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun** |  | **165.166.600** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | **Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun** |  | **165.166.600** |
|  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 Paket | 10.000.000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 Paket | 10.000.000 |
|  | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 Paket | 13.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 Paket | 13.000.000 |
|  | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 Paket | 10.000.000 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 Paket | 10.000.000 |
|  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 12.000.000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 12.000.000 |
|  | Penyusunan RKA-SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 50.166.600 | Penyusunan RKA-SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 50.166.600 |
|  | Penyusunan LAKIP | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 10.000.000 | Penyusunan LAKIP | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 10.000.000 |
|  | Penyusunan Renja SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 15.000.000 | Penyusunan Renja SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 Paket | 15.000.000 |
|  | Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium operator | 1 tahun | 45.000.000 | Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium operator | 1 tahun | 45.000.000 |
| **4** | **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah** |  | **Terselenggarannya Penertiban Pengelolaan Admnistrasi Aset/Barang Milik Daerah** |  | **87.000.000** | **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah** |  | **Terselenggarannya Penertiban Pengelolaan Admnistrasi Aset/Barang Milik Daerah** |  | **87.000.000** |
|  | Pengelolaan inventaris barang daerah | Kota Palangka Raya | Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasi dokumen barang daerah | 1 Tahun | 87.000.000 | Pengelolaan inventaris barang daerah | Kota Palangka Raya | Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasi dokumen barang daerah | 1 Tahun | 87.000.000 |
| **5** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  | **3.961.105.000** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  | **3.961.105.000** |
|  | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 14 Kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi pembinaan 10 Program Pokok PKK melalui Raker, seminar, monev | 14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain | 1.759.900.000 | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 14 Kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi pembinaan 10 Program Pokok PKK melalui Raker, seminar, monev | 14 Kab/Kota | 1.759.900.000 |
|  | Lomba pokjanal posyandu | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta Kab/Kota yang mengikuti lomba Pokjanal Posyandu | 14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain | 155.000.000 | Lomba pokjanal posyandu | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta Kab/Kota yang mengikuti lomba Pokjanal Posyandu | 14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain | 155.000.000 |
|  | Pelaksanaan profil desa/ kelurahan | Kota Palangka Raya dan 13 Kab. | Jumlah peserta Kab/Kota yang melaksanakan profil desa/kel | 14 Kabupaten/Kota | 40.000.000 | Pelaksanaan profil desa/ kelurahan | Kota Palangka Raya dan 13 Kab. | Jumlah peserta Kab/Kota yang melaksanakan profil desa/kel | 14 Kabupaten/Kota | 40.000.000 |
|  | PAP PNPM -MPd Generasi | 8 Kabupaten, Jakarta dan Provinsi Lain | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi | 40 org | 66.205.000 | PAP PNPM -MPd Generasi | 8 Kabupaten, Jakarta dan Provinsi Lain | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi | 40 org | 66.205.000 |
|  | Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan | 14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi | 40 org | 1.940.000.000 | Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan | 14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi | 40 org | 1.940.000.000 |
| **6** | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  | **Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat** |  | **620.000.000** | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  | **Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat** |  | **620.000.000** | **620.000.000** |
|  | Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro pedesaan | Kota Palangka Raya | Jumlah Kab. yang mendapatkan fasilitasi | 14 Kabupaten/Kota | 85.000.000 | Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro pedesaan | Kota Palangka Raya | Jumlah Kab. yang mendapatkan fasilitasi | 14 Kabupaten/Kota | 85.000.000 |
|  | Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM | 14 Kab/Kota | Junlah stimulan untuk pembangunan dan pengembangan juara lomba pasar desa dan tenaga pendamping | 4 unit, 4 Kabupaten/Kota | 120.000.000 | Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM | 14 Kab/Kota | Junlah stimulan untuk pembangunan dan pengembangan juara lomba pasar desa | 4 unit, 4 Kabupaten/Kota | 120.000.000 |
|  | Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan | 14 Kab/Kota | Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Rakor atau pelatihan | 50 orang | 75.000.000 | Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan | 14 Kab/Kota | Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Rakor atau pelatihan | 50 orang | 75.000.000 |
|  | Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD) | 14 Kab/Kota | Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Co manajemen | 14 Kabupaten/Kota | 60.000.000 | Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD) | 14 Kab/Kota | Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Co manajemen | 14 Kabupaten/Kota | 60.000.000 |
|  | Pembinaan BUMDes | 14 Kab/Kota | Terlaksananya pembinaan Bumdes | 4 kelompok | 80.000.000 | Pembinaan BUMDes | 14 Kab/Kota | Terlaksananya pembinaan Bumdes | 4 kelompok | 80.000.000 |
|  | Pelaksanaan pameran | Palangka Raya,Prov. Lain | Terlaksananya pameran | 1 Paket | 200.000.000 | Pelaksanaan pameran | Palangka Raya,Prov. Lain | Terlaksananya pameran | 1 Paket | 200.000.000 |
| **7** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  | **929.380.000** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  | **929.380.000** |
|  | Pembinaan Pembangunan Desa | Provinsi Kalimantan Tengah | Terbinanya masyarakat dalam pembangunan desa | 42 Desa/Kel | 89.200.000 | Pembinaan Pembangunan Desa | Provinsi Kalimantan Tengah | Terbinanya masyarakat dalam pembangunan desa | 42 Desa/Kel | 89.200.000 |
|  | Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan | 14 Kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yg mengikuti penilaian lomba desa kelurahan tingkat Provinsi | 14 Kabupaten/Kota | 180.000.000 | Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan | 14 Kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yg mengikuti penilaian lomba desa kelurahan tingkat Provinsi | 14 Kabupaten/Kota | 180.000.000 |
|  | Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat | 1 Kab/Kota | Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi pelaksanaan BBGRM | 14 Kabupaten/Kota | 250.000.000 | Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat | 1 Kab/Kota | Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi pelaksanaan BBGRM | 14 Kabupaten/Kota | 250.000.000 |
|  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | 13 Kab | Terlaksananya monev pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | 13 Kab | 410.180.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | 13 Kab | Terlaksananya monev pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | 13 Kab | 410.180.000 |
| **8** | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa** |  | **562.650.000** | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa** |  | **562.650.000** |
|  | Rakor pengelolaan keuangan dan aset desa | Kota Palangka Raya | Terlatihnya pengelola keuangan dan aset desa | 14 Kabupaten/Kota | 77.650.000 | Rakor pengelolaan keuangan dan aset desa | Kota Palangka Raya | Terlatihnya pengelola keuangan dan aset desa | 14 Kabupaten/Kota | 77.650.000 |
|  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota | Jakarta dan 14 Kab/Kota | Jumlah Desa yg menerima pembinaan dan monev pelaksanaan ADD | 30 Desa/Kel | 110.000.000 | Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota | Jakarta dan 14 Kab/Kota | Jumlah Desa yg menerima pembinaan dan monev pelaksanaan ADD | 30 Desa/Kel | 110.000.000 |
|  | Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa | Kota Palangka Raya | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan dan dana desa | 14 Kabupaten/Kota | 75.000.000 | Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa | Kota Palangka Raya | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan dan dana desa | 14 Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
|  | Sosialisasi peraturan desa | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | 80 Org | 100.000.000 | Sosialisasi peraturan desa | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | 80 Org | 100.000.000 |
|  | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Kota Palangka Raya | Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 120 Org | 200.000.000 | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Kota Palangka Raya | Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 120 Org | 200.000.000 |
| **9** | **Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  | **Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  | **635.000.000** | **Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  | **Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  | **635.000.000** |
|  | Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat | 1 Kab/ Kota | Jumlah peserta kemitraan | 50 orang | 100.000.000 | Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat | 1 Kab/ Kota | Jumlah peserta kemitraan | 50 orang | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan gelar TTG | 1 kab dan Provinsi Lain | Terlaksananya peran dan partisipasi dalam pelaksanaan Gelar TTG Nasional | 14 Kabupaten/Kota | 290.000.000 | Pelaksanaan gelar TTG | 1 kab dan Provinsi Lain | Terlaksananya peran dan partisipasi dalam pelaksanaan Gelar TTG Nasional | 14 Kabupaten/Kota | 290.000.000 |
|  | Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek | 14 Kab/Kota | Jumlah Posyantek yang terbentuk pada Kab/Kota sebagai Media Informasi dan pengembangan TTg dipedesaan | 14 Kabupaten/Kota | 75.000.000 | Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek | 14 Kab/Kota | Jumlah Posyantek yang terbentuk pada Kab/Kota sebagai Media Informasi dan pengembangan TTg dipedesaan | 14 Kabupaten/Kota | 75.000.000 |
|  | Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa | 14 Kab/Kota | Terlaksananya kepedulian dan tanggung jawab sosial investor/perusahaan swasta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah investasi melalui penerapan CD dan CSR yang berbasis kemitraan dan berkelanjutan | 4 laporan | 80.000.000 | Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa | 14 Kab/Kota | Terlaksananya kepedulian dan tanggung jawab sosial investor/perusahaan swasta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah investasi melalui penerapan CD dan CSR yang berbasis kemitraan dan berkelanjutan | 4 laporan | 80.000.000 |
|  | Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir | 14 Kab/Kota | Lokakarya pengelolaan sumber daya pesisir pantai berbasis masyarakat dan kearifan lokal | 14 Kab/Kota | 90.000.000 | Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir | 14 Kab/Kota | Lokakarya pengelolaan sumber daya pesisir pantai berbasis masyarakat dan kearifan lokal/ |  | 90.000.000 |
|  | **JUMLAH** |  |  |  | **9.486.160.000** |  |  |  |  | **9.486.160.000** |

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat**

Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa dan tekadnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada Tahun 2011 sebesar 4,5 %, Tahun 2012 sebesar 3,5 %, Tahun 2013 sebesar 3 %, Tahun 2014 sebesar 2,5 %, Tahun 2015 sebesar 2 %, serta keteresolasian dan rendahnya pembangunan infrastruktur perdesaan adalah merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya usulan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan juga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan misinya yaitu 1) pengembangan dan penguatan akonomi kerakyatan yang saling bersinergi; 2) pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah; 3) terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah, merupakan tolok ukur juga dalam pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.4 :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.4** | | | | | |
| **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepetingan Tahun 2017** | | | | | |
| **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan yang Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Setiap Tahun** |  |  |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya penyediaan materai, penggandaan surat menyurat | 1 paket |  |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Palangka Raya | Pembayaran biaya rekening telepon, listrik dan air | 12 bulan |  |
| 3 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya asuransi kebakaran gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng | 1 tahun |  |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 | 1 tahun |  |
| 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium pengelola keuangan | 12 bulan |  |
| 6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya honorarium petugas kebersihan, jaga malam dan pemeliharaan taman serta pengadaan alat pembersih dan alat kebersihan | 12 bulan |  |
| 7 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya jasa pemeliharaan/ service komputer, mesin tik | 12 unit |  |
| 8 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan |  |
| 9 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Palangka Raya | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen/ surat | 12 bulan |  |
| 10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pembelian bola lampu dan peralatan listrik lainnya dan pemasangan baru instalasi/ pemasangan listrik untuk gedung/aula BPMPD Prov. Kalteng | 4 Paket |  |
| 11 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya sarana dan fasilitas administrasi perkantoran | 1 paket |  |
| 12 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kota Palangka Raya | Tersedianya peralatan rumah tangga kantor | 12 bulan |  |
| 13 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Palangka Raya | Tersedianya pembayaran langganan surat kabar/majalah, buletin media informasi pemberdayaan masyarakat dan desa | 12 bulan |  |
| 14 | Penyediaan makanan dan minuman | Luar Daerah | Tersedianya sarana dan fasilitas administrasi perkantoran | 12 bulan |  |
| 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Dalam Daerah | Tersedianya snack dan minuman tamu/ rapat | 12 bulan |  |
| 16 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Provinsi Kalimantan Tengah | Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah | 1 tahun |  |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Setiap Tahun, Pengadaan Peralatan Kantor, Rehabilitasi Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas** | 1 tahun |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 | 12 bulan |  |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya service AC, sound sistem dan peralatan gedung kantor lainnya |  |  |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pengganti suku cadang kendaraan roda 4, pembelian pelumas dan bensin kendaraan roda 4 | 12 bulan |  |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor | 1 Paket |  |
| **III** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | **Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun** | 1 paket |  |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 paket |  |
| 2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 paket |  |
| 3 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan serta biaya penyusunan laporan | 1 paket |  |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 paket |  |
| 5 | Penyusunan RKA-SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 paket |  |
| 6 | Penyusunan LAKIP | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 paket |  |
| 7 | Penyusunan renja SKPD | Kota Palangka Raya | Tersedianya biaya cetak dan penggandaan laporan | 1 paket |  |
| 8 | Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D | Kota Palangka Raya | Pembayaran honorarium operator | 1 tahun |  |
| **IV** | **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah** |  | **Terselenggarannya Penertiban Pengelolaan Admnistrasi Aset/Barang Milik Daerah** | 1 tahun |  |
| 1 | Pengelolaan inventaris barang daerah | Palangka Raya | Tersedia dan tertibnya pengelolaan administrasi dokumen barang daerah | 1 tahun |  |
| **V** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  |  |
| 1 | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | Palangka Raya | Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi pembinaan 10 Program Pokok PKK melalui Raker, seminar, monev | 1 paket |  |
| 2 | Lomba pokjanal posyandu | Palangka Raya | Jumlah peserta Kab/Kota yang mengikuti lomba Pokjanal Posyandu | 8 kabupaten |  |
| 3 | Pelaksanaan profil desa/ kelurahan | 14 Kab/Kota | Jumlah peserta Kab/Kota yang melaksanakan profil desa/kel | 14 Kabupaten/Kota |  |
| 4 | PAP PNPM -MPd Generasi | 14 Kab/Kota | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi | 40 orang |  |
| 5 | Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan | 14 Kab/Kota | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi | 40 orang |  |
| **VI** | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  | **Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat** |  |  |
| 1 | Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro pedesaan | 14 Kab/Kota | Jumlah Kab. yang mendapatkan fasilitasi | 2 angkatan |  |
| 2 | Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM | Kota Palangka Raya | Junlah stimulan untuk pembangunan dan pengembangan juara lomba pasar desa dan tenaga pendamping | 4 unit, 4 Kabupaten/Kota |  |
| 3 | Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan | 14 Kab/Kota | Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Rakor atau pelatihan | 50 orang |  |
| 4 | Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD) | 14 Kab/Kota | Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Co manajemen | 14 kab/kota |  |
| 5 | Pembinaan BUMDes | 14 Kab/Kota | Terlaksananya pembinaan Bumdes | 2 paket |  |
| 6 | Pelaksanaan pameran | 14 Kab/Kota | Terlaksananya pameran | 1 paket |  |
| **VII** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  |  |
| 1 | Pembinaan Pembangunan Desa | 14 Kab/Kota | Terbinanya masyarakat dalam pembangunan desa | 42 desa/kel |  |
| 2 | Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan | 14 kab/kota | Jumlah Kab/Kota yg mengikuti penilaian lomba desa kelurahan tingkat Provinsi | 14 Kabupaten/Kota |  |
| 3 | Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat | 14 Kab/Kota | Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi pelaksanaan BBGRM | 42 orang |  |
| 4 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | Kota Palangka Raya | Terlaksananya monev pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa | 45 orang |  |
| **VIII** | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa** |  |  |
| 1 | Rakor pengelolaan keuangan dan aset desa | 14 kab/kota | Terlatihnya pengelola keuangan dan aset desa | 14 Kabupaten/Kota |  |
| 2 | Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota | Prov Kalteng | Jumlah Desa yg menerima pembinaan dan monev pelaksanaan ADD | 14 Kabupaten/Kota |  |
| 3 | Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa | Prov Kalteng | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan dan dana desa | 14 Kabupaten/Kota |  |
| 4 | Sosialisasi peraturan desa | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | 80 orang |  |
| 5 | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Kota Palangka Raya | Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 120 orang |  |
| **IX** | **Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  | **Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  |  |
| 1 | Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat | 14 Kab/Kota | Jumlah peserta kemitraan | 50 orang |  |
| 2 | Pelaksanaan gelar TTG | Kabupaten dan provinsi lainnya | Terlaksananya peran dan partisipasi dalam pelaksanaan Gelar TTG Nasional | 14 kab/kota |  |
| 3 | Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek | 14 Kab/Kota | Jumlah Posyantek yang terbentuk pada Kab/Kota sebagai Media Informasi dan pengembangan TTg dipedesaan | 30 Orang |  |
| 4 | Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa | 14 Kab/Kota | Terlaksananya kepedulian dan tanggung jawab sosial investor/perusahaan swasta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah investasi melalui penerapan CD dan CSR yang berbasis kemitraan dan berkelanjutan | 4 Laporan |  |
| 5 | Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir | 14 Kab/Kota | Lokakarya pengelolaan sumber daya pesisir pantai berbasis masyarakat dan kearifan local | 14 kab/kota |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Telahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari arah kebijakan dan strategi nasional dan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada agenda prioritas pemerintah terkait dengan desa melihat pada Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada point ke 3 (tiga) berbunyi “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangkan Negara Kesatuan”.

Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pembangunan daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa telah melaksanakan berbagai agenda yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
3. PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
5. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan antara lain:

1. tersusunnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan desa, meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana terakhir kali telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
2. di tahun 2014 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (b) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (c) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan (d) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. di tahun 2015 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, (b) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (c) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan (d) Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
4. di tahun 2016 ditetapkan 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (b) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (c) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (d) Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan (e) Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Kementerian Dalam Negeri memiliki tujuan pengaturan desa yang antara lain adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
7. meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Fokus Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah:

1. Pengawalan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan;
2. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal;
3. Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;
4. Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar;
5. Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.
6. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan.

Kalau dilihat dari penjabaran kebijakan nasional yang telah dituang dalam rencara strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bahwa arah program dan kegiatannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di pedesaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

* 1. **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah**
  2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan stretegi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 1 (satu) tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan intergrasi dalam menudukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 pada khususnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 pada umumnya.

* 1. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

* + - * 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
        2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
        3. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya masyarakat;
        4. Meningkatnya usaha ekonomi produksi masyarakat desa;
        5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

**BAB IV**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapainya.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan adalah 9 program dengan total kegiatan 54 kegiatan. Adapun Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

* + 1. **Program dan Kegiatan**
* Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

* Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan RKA-SKPD
6. Penyusunan LAKIP
7. Penyusunan Renja SKPD
8. Penyusunan Laporan TEPPA/SIMPPD

* Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

1. Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

* Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Lomba Pokjanal Posyandu
3. Pelaksanaan Profil Desa/Kelurahan
4. PAP PNPM Mandiri Perdesaan Generasi
5. Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

* Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan
2. Penguatan Lembaga Pasar Desa Untuk Pemasaran Hasil Produksi UEM
3. Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Pemanfaatan SDA Pedesaan Bagi Pembangunan Ketahanan Masyarakat (CPPD)
5. Pembinaan BUMDes
6. Pelaksanaan Pameran

* Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Pembinaan Pembangunan Desa
2. Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan
3. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

* Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota
3. Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa
4. Sosialisasi Peraturan Desa
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

* Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

1. Pola Kemitraan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) dengan Masyarakat
2. Pelaksanaan Gelar TTG
3. Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan Posyantek
4. Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
5. Peningkatan dan Pemanfaatan SDA di Kawasan Pesisir

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 4.1** | | | | | | | | | | |
| **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017** | | | | | | | | | | |
| **DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018** | | | | | | | | | | |
| **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAMA SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan** | | **Indikator  Kinerja Program** | **Rencana Tahun 2017** | | | | **Catatan  Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018** | |
|  | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp)** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp)** |
| **1** | **2** | | **3** | **6** | **5** |  | **4** | **8** | **9** | **10** |
| **2.07.2.07.1.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun** |  |  | **2.165.858.400** |  |  |  | **3.088.447.000** |
| 2.07.2.07.1.01.01 |  | Penyediaan jasa surat menyurat |  | Kota Palangka Raya | Terkirim 1400 surat | 12.715.000 | APBD |  | Terkirim 1400 surat | 15.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.02 |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | Kota Palangka Raya | Pembayaran Biaya Rekening Telefon, Listrik dan Air 5 Rekening Pembayaran | 236.800.000 | APBD |  | Pembayaran Biaya Rekening Telefon, Listrik dan Air 5 Rekening Pembayaran | 230.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.05 |  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah |  | Kota Palangka Raya | Asuransi gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng 1 Polis Asuransi | 20.000.000 | APBD |  | Asuransi gedung kantor BPMPD Prov. Kalteng 1 Polis Asuransi | 20.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.06 |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional |  | Kota Palangka Raya | Jumlah kendaraan dinas operasional 19 Unit | 10.000.000 | APBD |  | Jumlah kendaraan dinas operasional 19 Unit | 10.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.07 |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset |  | Kota Palangka Raya | Honorarium pengelolaa keuangan 29 Orang Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 20 orang | 975.747.000 | APBD |  | Honorarium pengelolaa keuangan 29 Orang Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 20 orang | 998.447.000 |
| 2.07.2.07.1.01.08 |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor |  | Kota Palangka Raya | Pengadaan alat pembersih dan 18 jenis bahan kebersihan | 136.395.000 | APBD |  | Pengadaan alat pembersih dan 18 jenis bahan kebersihan | 65.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.09 |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja |  | Kota Palangka Raya | Komputer dan mesin tik  12 Unit | 15.000.000 | APBD |  | Komputer dan mesin tik  12 Unit | 15.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.10 |  | Penyediaan alat tulis kantor |  | Kota Palangka Raya | Jumlah ATK 21 Jenis | 21.500.000 | APBD |  | Jumlah ATK 21 Jenis | 30.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.11 |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | Kota Palangka Raya | Jumlah buku dan fotocopy 100 Buku dan 45.550 Lembar | 31.500.000 | APBD |  | Jumlah buku dan fotocopy 100 Buku dan 45.550 Lembar | 35.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.12 |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor |  | Kota Palangka Raya | Jumlah bola lampu dan peralatan plastik 11 Jenis | 15.000.000 | APBD |  | Jumlah bola lampu dan peralatan plastik 11 Jenis | 70.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.13 |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Kota Palangka Raya | Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | 230.600.000 | APBD |  | Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor | 130.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.14 |  | Penyediaan peralatan rumah tangga |  | Kota Palangka Raya | Jumlah barang peralatan rumah tangga kantor 10 Jenis | 10.000.000 | APBD |  | Jumlah barang peralatan rumah tangga kantor 10 Jenis | 10.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.15 |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | Kota Palangka Raya | Jumlah media 4 Media | 70.000.000 | APBD |  | Jumlah media 4 Media | 1.100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.17 |  | Penyediaan makanan dan minuman |  | Kota Palangka Raya | Snack dan Minum Tamu/Rapat-Rapat 4 Kali | 10.000.000 | APBD |  | Snack dan Minum Tamu/Rapat-Rapat 4 Kali | 10.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.18 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | Kota Palangka Raya | Jumlah perjalanan dinas luar daerah 15 Kali | 145.449.000 | APBD |  | Jumlah perjalanan dinas luar daerah 15 Kali | 200.000.000 |
| 2.07.2.07.1.01.19 |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |  | Kota Palangka Raya | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 19 Kali | 225.152.400 | APBD |  | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 19 Kali | 150.000.000 |
| **2.07.2.07.1.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **Terselenggaranya Peningkatan dan Prasarana Aparatur** |  |  | **360.000.000** |  |  |  | **585.000.000** |
| 2.07.2.07.1.02.05 |  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional |  | Kota Palangka Raya | Jumlah 1 buah kendaraan dinas roda 4 | 250.000.000 | APBD |  | Jumlah 1 buah kendaraan dinas roda 4 | 485.000.000 |
| 2.07.2.07.1.02.22 |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | Kota Palangka Raya | Jumlah bahan baku bangunan 10 Jenis | 30.000.000 | APBD |  | Jumlah bahan baku bangunan 10 Jenis | 20.000.000 |
| 2.07.2.07.1.02.24 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | Kota Palangka Raya | Jumlah kendaraan dinas 1 Unit | 60.000.000 | APBD |  | Jumlah kendaraan dinas 1 Unit | 60.000.000 |
| 2.07.2.07.1.02.26 |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |  | Kota Palangka Raya | Jumlah AC, Sound sistem dan peralatan gedung kantor lainya 20 Unit | 20.000.000 | APBD |  | Jumlah AC, Sound sistem dan peralatan gedung kantor lainya 20 Unit | 20.000.000 |
| **2.07.2.07.1.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | **Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Setiap Tahun** |  |  | **165.166.600** |  |  |  | **165.166.600** |
| 2.07.2.07.1.06.01 |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |  | Kota Palangka Raya | Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 40 Buku | 10.000.000 | APBD |  | Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 40 Buku | 10.000.000 |
| 2.07.2.07.1.06.02 |  | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran |  | Kota Palangka Raya | Dokumen Laporan keuangan semester BPMPD Prov. Kalteng 80 Buku | 13.000.000 | APBD |  | Dokumen Laporan keuangan semester BPMPD Prov. Kalteng 80 Buku | 13.000.000 |
| 2.07.2.07.1.06.03 |  | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran |  | Kota Palangka Raya | Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran BPMPD Prov. Kalteng 40 Buku | 10.000.000 | APBD |  | Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran BPMPD Prov. Kalteng 40 Buku | 10.000.000 |
| 2.07.2.07.1.06.04 |  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun |  | Kota Palangka Raya | Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun BPMPD Prov. Kalteng 40 Buku, Honorarium tim penyusun 12 org | 12.000.000 | APBD |  | Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun BPMPD Prov. Kalteng 40 Buku, Honorarium tim penyusun 12 org | 12.000.000 |
| 2.07.2.07.1.06.06 |  | Penyusunan RKA-SKPD |  | Kota Palangka Raya | 150 buku RKA | 50.166.600 | APBD |  | 150 buku RKA | 50.166.600 |
| 2.07.2.07.1.06.14 |  | Penyusunan LAKIP |  | Kota Palangka Raya | Dokumen LAKIP 50 Buku | 10.000.000 | APBD |  | Dokumen LAKIP 50 Buku | 10.000.000 |
| 2.07.2.07.1.06.15 |  | Penyusunan Renja SKPD |  | Kota Palangka Raya | Dokumen Renja 50 Buku | 15.000.000 | APBD |  | Dokumen Renja 50 Buku | 15.000.000 |
| 2.07.2.07.1.06.33 |  | Penyusunan laporan TEPPRA/SIMP3D |  | Kota Palangka Raya | Operator TEPPA/SIMPPD 3 Orang | 45.000.000 | APBD |  | Operator TEPPA/SIMPPD 3 Orang | 45.000.000 |
| **2.07.2.07.1.08** | **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah** | | **Terselenggarannya Penertiban Pengelolaan Admnistrasi Aset/Barang Milik Daerah** |  |  | **87.000.000** |  |  |  | **150.000.000** |
| 2.07.2.07.1.08.01 |  | Pengelolaan inventaris barang daerah |  | Kota Palangka Raya | Jumlah dokumen barang 20 dokumen, Honorarium pengelola barang 50 org, honorarium tim inventarisasi 12 org |  | APBD |  | Jumlah dokumen barang 20 dokumen, Honorarium pengelola barang 50 org, honorarium tim inventarisasi 12 org | 150.000.000 |
| **2.07.2.07.1.15** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** |  |  | **3.961.105.000** |  |  |  | **4.700.000.000** |
| 2.07.2.07.1.15.05 |  | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) |  | 14 Kab/Kota | Dokumen laporan 10 Laporan | 1.759.900.000 | APBD |  | Dokumen laporan 10 Laporan | 2.100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.15.07 |  | Lomba pokjanal posyandu |  | Kota Palangka Raya | Peserta Rakor Pokjanal Posyandu berjumlah 60 Orang | 155.000.000 | APBD |  | Peserta Rakor Pokjanal Posyandu berjumlah 60 Orang | 150.000.000 |
| 2.07.2.07.1.15.09 |  | Pelaksanaan profil desa/ kelurahan |  | Kota Palangka Raya dan 13 Kab. | Jumlah peserta pelatihan 65 Orang | 40.000.000 | APBD |  | Jumlah peserta pelatihan 65 Orang | 150.000.000 |
| 2.07.2.07.1.15.19 |  | PAP PNPM -MPd Generasi |  | 8 Kabupaten, Jakarta dan Provinsi Lain | Jumlah laporan 1 Laporan | 66.205.000 | APBD |  | Jumlah laporan 1 Laporan | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.15.20 |  | Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan |  | 14 Kab/Kota, Jakarta dan Provinsi Lain | Jumlah laporan 3 Laporan | 1.940.000.000 | APBD |  | Jumlah laporan 3 Laporan | 2.200.000.000 |
| **2.07.2.07.1.16** | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** | | **Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro, serta Akses Modal Usaha bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat** |  |  | **620.000.000** |  |  |  | **885.000.000** |
| 2.07.2.07.1.16.08 |  | Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro pedesaan |  | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 2 angkatan | 85.000.000 | APBD |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 2 angkatan | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.16.09 |  | Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM |  | 14 Kab/Kota | Laporan penilaian lomba pasar desa 1 Laporan | 120.000.000 | APBD |  | Laporan penilaian lomba pasar desa 1 Laporan | 150.000.000 |
| 2.07.2.07.1.16.10 |  | Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan |  | 14 Kab/Kota | Jumlah laporan 1 Laporan | 75.000.000 | APBD |  | Jumlah laporan 1 Laporan | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.16.11 |  | Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD) |  | 14 Kab/Kota | Jumlah peserta 30 Orang | 60.000.000 | APBD |  | Jumlah peserta 30 Orang | 85.000.000 |
| 2.07.2.07.1.16.15 |  | Pembinaan BUMDes |  | 14 Kab/Kota | Jumlah Laporan 4 dokumen | 80.000.000 | APBD |  | Jumlah Laporan 4 dokumen | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.16.17 |  | Pelaksanaan pameran |  | Palangka Raya,Prov. Lain | Jumlah Laporan 2 Laporan | 200.000.000 | APBD |  | Jumlah Laporan 2 Laporan | 350.000.000 |
| **2.07.2.07.1.17** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa** | | **Terciptanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  |  | **929.380.000** |  |  |  | **1.160.000.000** |
| 2.07.2.07.1.17.05 |  | Pembinaan Pembangunan Desa |  | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah peserta masing-masing kegiatan pelatihan 84 Orang | 89.200.000 | APBD |  | Jumlah peserta masing-masing kegiatan pelatihan 84 Orang | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.17.06 |  | Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan |  | 14 Kab/Kota | Laporan lomba desa kelurahan Tingkat Provinsi 1 Laporan | 180.000.000 | APBD |  | Laporan lomba desa kelurahan Tingkat Provinsi 1 Laporan | 200.000.000 |
| 2.07.2.07.1.17.08 |  | Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat |  | 1 Kab/Kota | Laporan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Laporan | 250.000.000 | APBD |  | Laporan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Laporan | 260.000.000 |
| 2.07.2.07.1.17.12 |  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa |  | 14 Kab/Kota | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 30 Kali | 410.180.000 | APBD |  | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 30 Kali | 600.000.000 |
| **2.07.2.07.1.18** | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** | | **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintahan Desa** |  |  | **562.650.000** |  |  |  | **741.611.900** |
| 2.07.2.07.1.18.05 |  | Rakor pengelolaan keuangan dan aset desa |  | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta yang mengikuti rakor 40 orang | 77.650.000 | APBD |  | Jumlah peserta yang mengikuti rakor 40 orang | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.18.06 |  | Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota |  | Jakarta dan 14 Kab/Kota | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 kali | 110.000.000 | APBD |  | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 kali | 150.000.000 |
| 2.07.2.07.1.18.07 |  | Monitoring penyaluran bantuan keuangan dan dana desa |  | Kota Palangka Raya | Jumlah desa/kel yang menerima bantuan DBK 1.428 desa/kel | 75.000.000 | APBD |  | Jumlah desa/kel yang menerima bantuan DBK 1.428 desa/kel | 70.000.000 |
| 2.07.2.07.1.18.08 |  | Pelaksanaan Pembinaan Pemdes dan Kel pada Desa Model |  | Kota Palangka Raya | Penyelenggaraan pemdes dan kel pada desa model | 0 | APBD |  | Penyelenggaraan pemdes dan kel pada desa model | 0 |
| 2.07.2.07.1.18.09 |  | Pelatihan Pemantapan Tupoksi BPD |  | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta pelatihan 40 orang | 0 | APBD |  | Jumlah peserta pelatihan 40 orang | 0 |
| 2.07.2.07.1.18.11 |  | Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa |  | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta pelatihan 40 orang | 0 | APBD |  | Jumlah peserta pelatihan 40 orang | 0 |
| 2.07.2.07.1.18.15 |  | Sosialisasi peraturan desa |  | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 120 orang | 100.000.000 | APBD |  | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 120 orang | 100.000.000 |
| 2.07.2.07.1.18.18 |  | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan |  | Kota Palangka Raya | Jumlah desa yang menerima fasilitasi 100 desa/kel | 200.000.000 | APBD |  | Jumlah desa yang menerima fasilitasi 100 desa/kel | 321.611.900 |
| 2.07.2.07.1.18.19 |  | Bimtek pengadaan barang/jasa di desa |  | Kota Palangka Raya | Jumlah peserta pelatihan 40 orang | 0 | APBD |  | Jumlah peserta pelatihan 40 orang | 0 |
| 2.07.2.07.1.18.20 |  | Inventarisasi aset desa |  | Kota Palangka Raya | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 | APBD |  | Jumlah desa yang difasilitasi | 0 |
| **2.07.2.07.1.20** | **Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** | | **Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)** |  |  | **635.000.000,-** |  | Kegiatan baru di luar renstra |  | **640.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.2.07.1.20.01 |  | Pola Kemitraan TMMD dengan masyarakat |  | 1 Kab/ Kota | Jumlah laporan 5 laporan, jumlah peserta 40 orang | 100.000.000 | APBD |  | Jumlah laporan 5 laporan, jumlah peserta 40 orang | 60.000.000 |
| 2.07.2.07.1.20.02 |  | Pelaksanaan gelar TTG |  | 1 kab dan Provinsi Lain | Jumlah 1 laporan, jumlah 40 peserta lomba | 290.000.000 | APBD |  | Jumlah 1 laporan, jumlah 40 peserta lomba | 300.000.000 |
| 2.07.2.07.1.20.06 |  | Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyantek |  | 14 Kab/Kota | jumlah peserta 40 orang | 75.000.000 | APBD |  | jumlah peserta 40 orang | 75.000.000 |
| 2.07.2.07.1.20.08 |  | Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa |  | 14 Kab/Kota | Jumlah 5 laporan, jumlah peserta sosialisasi 42 orang | 80.000.000 | APBD |  | Jumlah 5 laporan, jumlah peserta sosialisasi 42 orang | 75.000.000 |
| 2.07.2.07.1.20.09 |  | Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir |  | 14 Kab/Kota | Jumlah 5 laporan, jumlah peserta rakor 40 orang | 90.000.000 | APBD |  | Jumlah 5 laporan, jumlah peserta rakor 40 orang | 130.000.000 |
|  | **Jumlah** | |  |  |  | **9.486.160.000** |  |  |  | **12.115.225.500** |

**BAB V**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 yang didalamnya mengandung strategi dan arah kebijakan serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang dipakai sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ir. YUREN S. BAHAT, MM. MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19630510 199003 1 014